

DADIH ABDULHADI RAIH DOKTER FH UII

## Teliti Perda APBD Berkeadilan Sosial

**SLEMAN (KR)** - Tiap daerah mendapat kewenangan luas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara mutlak. Artinya, terdapat pembatasan yang patut diperhatikan daerah agar tidak terjadi tindakan melampaui kewenangan dan mengarah pada penegegasian terhadap pencapaian kesejahteraan sosial.

Hal tersebut dikemukakan promovendus Dadih Abdulhadi ketika mempertahankan disertasi berjudul 'Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Keadilan Sosial' di FH UII di Jalan

Kaliurang KM 14,5, Sabtu (30/8). Dr Dadih Abdulhadi, Dosen Universitas Mayasari Bakti (UMB) Tasikmalaya ini, dipromotori Prof Dr Ni'matul Huda dan co-promotor Prof Dr Ridwan. Ia menjadi lulusan ke-194 Program Doktor FH UII.

"Pembatasan dimaksud dikristalkan dalam bentuk keharusan memperhatikan prinsip keadilan sosial dalam setiap pembentukan kebijakan," jelasnya.

Keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prinsip umum sekaligus bintang penuntun yang akan memastikan agregasi dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dikelu-



KR-Istimewa

**Dr Dadih Abdulhadi**

arkan dapat memenuhi rasionalitas pragmatis dan rasionalitas etis.

Oleh karena itu, menurutnya, kepala daerah dan DPRD dalam merumuskan anggaran, harus memberikan prioritas penyelesaian problematika masyarakat yang di-

dasarkan pada delapan dimensi keadilan sosial. Ke-8 itu yakni pencegahan kemiskinan (dengan bobot tiga kali lipat), akses terhadap pendidikan (dengan bobot dua kali lipat), ketersediaan lapangan kerja (dengan bobot dua kali lipat).

Dadih mengungkapkan, pembentuk peraturan perundang-undangan secara sinergis perlu melakukan revisi terhadap instrumentarium yuridis pembentukan Perda tentang APBD. Hal tersebut perlu dilakukan dengan menambahkan prinsip partisipasi dan distribusi pada bab tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. (Fsy)-f